



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kalimantan Barat 78124

Telepon (0561) 736541 Faksimile (0561) 730062

Laman www.kalbarprov.go.id. Pos-el setda@kalbarprov.go.id

LAPORAN ATAS PEMANTAUAN PENGELOLAAN RESIKO PADA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025

A. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkunga Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

B. Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Resiko

1. Identifikasi Resiko

Dalam rangka pencapaian target kinerja maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan identifikasi terhadap kemungkinan risiko yang akan muncul pada tahun berjalan dimana dalam proses identifikasi tersebut terdapat 17 (tujuh belas) risiko yang muncul dimana risiko tersebut terbagi atas 1 (satu) risiko strategis PD dan 16 (enam belas) risiko operasional sesuai dengan dokumen manajemen risiko tahun 2025 yang telah disusun sebelumnya. (*form identifikasi risiko terlampir*).

2. Jumlah Risiko Prioritas / Hasil Analisis Risiko

Dalam rangka pencapaian target kinerja khususnya indikator kinerja utama Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, maka dilakukan pembahasan terhadap risiko prioritas

perangkat daerah dengan tingkat kemungkinan terjadi yang tinggi dimana jumlah risiko prioritas yang dilakukan pembahasan sebanyak 10 (sepuluh) risiko yang terbagi atas 1 (satu) risiko strategis PD dan 7 (tujuh) risiko operasional (*form identifikasi risiko terlampir*).

3. Pemantauan Keterjadian Risiko dan Kegiatan Pengendalian

a. Risiko yang terjadi

No	Nama Resiko	Sebab	Dampak	Pihak yang terkena
Resiko Strategis OPD				
1	Menurunnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	1. SiRUP, E-Tendering, E-Purchasing, Non tendering/Non E-Purchasing, E-kontrak. 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ. 3. Tingkat Kematangan UKPBJ	Penilaian Terhadap Akuntabilitas Pemerintah tidak maksimal	Pemprov
Resiko Operasional OPD				
1	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan.	Belum terpenuhinya ketersediaan SDM Pokja Pemilihan sesuai perhitungan beban kerja	Proses pelayanan pemilihan penyedia terlambat karena usulan PPK	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait.
2	Rencana RUP dan realisasi pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE tidak diinput/ tidak lengkap.	Belanja Modal dan Belanja Operasional belum diinput seluruhnya di SPSE.	Rendahnya Nilai Raport Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalbar secara Nasional	Biro PBJ
3	Rendahnya persentase tindak lanjut Pengaduan di SPSE.	Jumlah pengaduan (tiket) yang dieskalasi ke LKPPP tidak ditindaklanjuti.	Beberapa Permasalahan Teknis yang menyangkut Aplikasi SPSE tidak dapat diselesaikan	Pemda.

b. Pengendalian yang dilakukan atas resiko yang terjadi

No	Nama Risiko	Pengendalian Yang Dilakukan	Waktu Pelaksanaan	Dapat/Tidak dapat mengurangi risiko
Resiko Strategis OPD				
1	Menurunnya Indeks Tata Kelola Pengadaan	Berkomunikasi dengan Admin LKPP RI	Jan-Des	Dapat mengurangi risiko
Resiko Operasional OPD				
1	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan.	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah	Jan-Des setelah terbitnya DPPA	Dapat mengurangi risiko
2	Rencana RUP dan realisasi pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE tidak diinput/ tidak lengkap.	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah	Jan-Des setelah terbitnya DPPA	Dapat mengurangi risiko
3	Rendahnya persentase tindak lanjut Pengaduan di SPSE.	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap	Jan-Des setelah terbitnya DPPA	Dapat mengurangi risiko

		dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah		
--	--	--	--	--

c. Resiko yang baru terjadi di 2025

Hingga saat ini belum terdapat resiko baru yang terdeteksi sebagai hambatan dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

C. Hambatan dan Rekomendasi

Adapun hambatan dan rekomendasi yang sudah di susun oleh Tim Manajemen Risiko Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kalbar tertuang pada lampiran laporan manajemen risiko ini.

Pontianak, 15 Januari 2026

Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



Prasetvo Tri Sejati, S.STP, MM

Pembina

NIP: 19820325 200112 1 002

IDENTIFIKASI RESIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat								
Nama OPD	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat								
Tahun Penilaian	2025								
Periode yang dinilai	Periode RPJMD Tahun 2025-2029								
Tujuan Strategis	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien								
Urutan Pemerintahan	Urutan Pendukung Urutan Pemerintahan								
Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Tujuan :									
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP								
Sasaran Strategis OPD:									
Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Memurnainya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RSP.26.99.02.01	Gubernur	1. a. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) : Tidak akuratnya data/informasi yang teruji pada setiap paket RUP yang telah diumumkan pada Aplikasi SIRUP oleh PA/KPA, sehingga Data RUP Final Tahun Anggaran 2025 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak dapat menggambarkan kondisi pengadaan barang dan jasa yang sesungguhnya. b. E-Tendering (Tender/Seleksi/Tender Cepat) : proses pengujian paket pekerjaan dengan metode pengadaan secara tender/Seleksi kepada Biro Pengadaan Barang dan Jasa yang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan berdampak terhadap penyerapan anggaran yang tidak maksimal, kualitas pekerjaan yang menurun dan terlambatnya penyelesaian publik. c. E-Purchasing: kurangnya ketelitian memilih kategori dalam pemilihan penyedia oleh Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga terjadinya kesalahan terhadap pelaksanaan belanja pada metode e-purchasing yang berujung pada kesalahan administrasi. d. Non E-Tendering/Non E-Purchasing: Masih terdapat perangkat daerah yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara manual (non-elektronik) sehingga hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak maksimal. Ketidakefektifan tersebut tentunya dapat menghambat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). e. E-Kontrak: Kurangnya kesadaran PPK dalam melaksanakan penginputan Kontrak pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) menyebabkan proses pekerjaan tidak akan terbuka oleh sistem UKPBJ maupun LKPP sehingga salah satu objek kepatuhan pengadaan barang/jasa tidak tercapai. 2. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ: Ketidakterpenuhinya standar kompetensi SDM PBJ menimbulkan risiko pemenuhan nilai ITKP, yang berimplikasi pada rendahnya kualitas tata kelola pengadaan. 3. Tingkat Kematangan UKPBJ: tingkat kematangan UKPBJ merupakan komponen penilaian ITKP dengan bobot 40 poin, sehingga ketidakefektifan pada aspek tersebut berisiko menurunkan capaian ITKP dan kinerja tata kelola pengadaan.	Internal	C	Pemilaian Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Tidak Maksimal	Pemprov

Pontianak, 15 Januari 2026
 Ptl. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PERANGKAT DAERAH

Nama Pemda		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat									
Nama OPD		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat									
Tahun Penilaian		2025									
Periode yang diteliti		Periode RPJMD Tahun 2025-2029									
Tujuan Strategis		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien									
Sasaran Strategis OPD		Meningkatnya Efektivitas Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah									
Uraian Pemerintahan		Uraian Pendukung Uraian Pemerintahan									
OPD yang Diteliti		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat									
No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Keberhasilan	Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pemanfaatan Sistem Pengadaan									
		Persentase penggunaan SPSE									
		Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ									
		Tingkat Kematangan UKPBJ									
1	Kegiatan: Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengadaan Barang/Jasa Secara Kompetitif	Perencanaan dan Pelaksanaan	Tidak tercapainya target pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	RSO.26.99.02.01	Kabag/PPTK	Masih belum optimalnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan oleh para pelaku pengadaan	Eksternal dan Internal	UC	Berpengaruh pada pencapaian target serapan anggaran Pemerintah Provinsi Kalbar.	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
1	Pengelolan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Perencanaan	Informasi rencana jadwal yang teruji dalam paket RUP yang disampaikan PA/KPA tidak tepat / tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya/	RSO.26.99.02.02	Kabag/PPTK	Karangnya koordinasi terkait penentuan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga admin RUP pada perangkat daerah kurang tepat dalam melakukan inputan RUP kedalam Aplikasi SIRUP.	Eksternal	C	Meningkatnya penyempitan paket tender/seleksi serta pelaksanaan metode lainnya pada pengadaan barang/jasa dalam periode waktu tertentu.	Perangkat Daerah
				Lambatnya aktivitas pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan s/d serah terima pekerjaan	RSO.26.99.02.03	Kabag/PPTK	Lambatnya penetapan pelaku pengadaan barang/jasa pada perangkat daerah.	Eksternal	C	Ketidaktertibn dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan inputan RUP kedalam Aplikasi SIRUP.	Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan.	RSO.26.99.02.04	Kabag/PPTK	Belum terpecahinya ketersediaan SDM Pokja Pemilihan sesuai perhitungan beban kerja	Internal	C	Proses pelayanan pemilihan penyedia terlambat karena urusan PPK.	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
				Pokja Pemilihan tidak lulus dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.26.99.02.05	Kabag/PPTK	Keterlambatan PPK dalam menyiapkan dokumen persiapan pengadaan	Internal	C	Kegagalan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang menyebabkan bertambahnya waktu pemilihan penyedia	Biro PBJ dan Perangkat Daerah terkait
3	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Penyajian data belum optimal	RSO.26.99.02.06	Kabag/PPTK	Format data/penyajian data terkait informasi pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat belum mencerminkan keadaan yang semestinya.	Internal	C	Data hasil Pemantauan dan Evaluasi yang dilakukan kurang optimal dalam memberikan pertimbangan/saran yang tepat bagi perumusan strategi pengadaan di tahun berikutnya.	Biro PBJ

				Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.26.99.02.07	Kabag/PPTK	Penghapusan RUP pada Aplikasi SIRUP tidak akurat	Internal	C	2. Pelaksanaan PBJ tidak tepat waktu	Biro PBJ
2	Kegiatan: Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase Paket Pengadaan Barang/Jasa Yang Menggunakan SPSE	Pelaksanaan	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak dilaput / tidak lengkap	RSO.26.99.02.02.08	Kabag/PPTK	Belanja Operasional dan Belanja Modal yang seharusnya harus dilaput pada Aplikasi SPSE	Eksternal	C	Rendahnya Nilai Rapor Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kalbar secara Nasional	Pemerintah Daerah/ Biro PBJ
	1	Pengelolaan Sistem Pengadaan secara Elektronik	Pelaksanaan	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengadaan di SPSE	RSO.26.99.02.02.09	Kabag/PPTK	Jumlah Pengadaan (Tiket) yang di Eskalasi Ke Admin LKPP Tidak Ditindaklanjuti	Eksternal	UC	Beberapa Permasalahan Teknis yang menyangkut Aplikasi SPSE tidak dapat diselesaikan	Biro PBJ
	2	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.26.99.02.02.10	Kabag/PPTK	Kebutuhan Fungsi Aplikasi Yang Dinamis	Internal	C	Pemanfaatan Aplikasi Pendukung tidak Optimal	Biro PBJ
	3	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.26.99.02.11	Kabag/PPTK	Pemilik Informasi (OPD) Tidak Melaporkan Terkait Pelaksanaan PBJ	Eksternal	C	Tidak dapat mempublikasikan seluruh Pengadaan Barang dan Jasa	Biro PBJ
3	Kegiatan: Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pemenuhan variabel Level Kematangan UKPBJ di Kalbar	Pelaksanaan	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.26.99.02.12	Kabag/PPTK	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 9 variabel tingkat kematangan	Eksternal	UC	masih membutuhkan waktu untuk meningkatkan tingkat kematangan UKPBJ menjadi level 3 (pro aktif)	Biro PBJ dan UKPBJ/Kab/Kota
			Pelaksanaan	Partisipasi Pelaku Pengadaan Khususnya Penyedia Dalam Kegiatan Pembinaan PBJ Kurang Optimal	RSO.26.99.02.13	Kabag/PPTK	Kegiatan Pembinaan Yang Bersifat Tetap Muka Sangat Terbatas	Internal	C	pelaku usaha masih sering menemui kendala dalam proses pengadaan	Biro PBJ
	1	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.26.99.02.14	Kabag/PPTK	Terbatasnya Anggaran Untuk Pengembangan Kompetensi Dihadangtikan Dengan Kebutuhan Kompetensi Yang Perlu Dikembangkan	Internal	C	Tidak optimalnya pengadaan barang dan jasa	Biro PBJ dan Pemerintah Daerah Terkait
	2	Pembinaan Ketenagakerjaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.26.99.02.15	Kabag/PPTK	UKPBJ Kab/Kota belum dapat memenuhi 4 domain dan 9 variabel tingkat kematangan	Eksternal	UC	UKPBJ Kab/Kota tidak bisa menjadi Center Of Excellence level 3 dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang pro aktif	Biro PBJ dan UKPBJ Terkait
	3	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Pelaksanaan	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak optimal	RSO.26.99.02.16	Kabag/PPTK	Kegiatan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis PBJ Tidak Optimal	Internal	C	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tidak optimal	Biro PBJ dan OPD

Pontianak, 19 Januari 2024
 PR. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA,



HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat			
Tahun Penilaian		2025			
Tujuan Strategis		Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien			
Urusan Pemerintah		Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan			
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		Skala Risiko
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	
a	b	c	d	e	F=dxe
I	Risiko Strategis				
1					
2					
II	Risiko Strategis Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
	Menurunnya Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	RSP.26.99.02.01	4	3	12
III	Risiko Operasional Biro Pengadaan Barang dan Jasa				
1	Tidak tercapainya target pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu	RSO.26.99.02.01	3	2	6
2	Informasi rencana jadwal yang tersaji dalam paket RUP yang diumumkan PA/KPA tidak tepat (tidak mencerminkan rencana pelaksanaan yang sebenarnya)	RSO.26.99.02.02	3	3	9
3	Lambatnya aktivitas pengadaan barang/jasa mulai dari perencanaan s/d serah terima pekerjaan	RSO.26.99.02.03	4	3	12
4	Pokja Pemilihan mengalami kelebihan beban paket pengadaan berjalan	RSO.26.99.02.04	3	3	9
5	Pokja Pemilihan tidak leluasa dalam mereview, menetapkan durasi jadwal pemilihan, menyusun dokumen pemilihan, hingga mengevaluasi penawaran peserta	RSO.26.99.02.05	3	3	9
6	Penyajian data belum optimal	RSO.26.99.02.06	3	3	9
7	Perencanaan pengadaan tidak akurat/tepat	RSO.26.99.02.07	4	3	12
8	Rencana RUP dan Realisasi Pengadaan Barang/ Jasa Pada Aplikasi SPSE tidak diinput / tidak lengkap	RSO.26.99.02.07	4	3	12
9	Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Pengadaan di SPSE	RSO.26.99.02.02.08	3	2	6
10	Aplikasi pendukung belum mampu memenuhi kebutuhan pengguna	RSO.26.99.02.02.09	3	2	6
11	Terbatasnya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa yang dipublikasi	RSO.26.99.02.02.10	3	2	6
12	Upaya Meningkatkan Tingkat Kematangan UKPBJ Kab/Kota Menjadi Level 3 (Pro Aktif) tidak tercapai	RSO.26.99.02.11	2	2	4
13	Partisipasi Pelaku Pengadaan Khususnya Penyedia Dalam Kegiatan Pembinaan PBJ Kurang Optimal	RSO.26.99.02.12	3	3	9
14	Pengembangan Kompetensi Pengelola pengadaan barang dan jasa tidak maksimal	RSO.26.99.02.13	3	2	6
15	Level 3 Center Of Excellence Kab/Kota tidak tercapai	RSO.26.99.02.14	3	2	6
16	Kompetensi pelaku pengadaan barang dan jasa OPD tidak optimal	RSO.26.99.02.15	3	3	9

Pontianak, 15 Januari 2026

Plt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA



RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urutan Pemerintahan		Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 2025 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Urutan Pendukung Urutan Pemerintahan				
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Berkomunikasi dengan Admin LKPP RI	Via email/ WA/ Surat Sekda/Kunjungan Langsung	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Jan-Des	Jan-Des	
2	kegiatan Reviu dan Pendampingan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa pada Perangkat Daerah dilakukan secara berkala/bertahap dan setiap tahapan berikutnya sebagai evaluasi atas tahapan sebelumnya untuk melihat progres capaian dari Perangkat Daerah	Menyurati Perangkat Daerah melalui Surat Gubernur	Bagian Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	
3	Melakukan Penarikan Data Dihari Berikutnya	Dibuat grup WA untuk menyampaikan/memberikan Laporan Hasil Inputan setiap minggu di level admin dan pimpinan	PBJ Prov. Kalbar	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	Jan-Des Setelah Terbit DPA dan DPPA	
4	Tetap Melakukan Pembinaan	Melakukan pembinaan secara langsung ke UKPBJ Kab/Kota dan melalui Surat ke Bupati/Walikota	PBJ Prov. Kalbar	Jan-Des	Jan-Des	
5	Koordinasi Dengan LKPP Sebagai Pelaksanaan Pembinaan	Via email/ WA/ Surat Sekda/Kunjungan Langsung	PBJ Prov. Kalbar	Jan-Des	Jan-Des	

Pontianak, 15 Januari 2026

Ptt. KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA

